

Doran, Agus Fransisko. (2020). Peran Kepala Kampung Dalam Pembangunan Kampung Ngenyan Asa di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. *Prediksi*. Vol. 1(1). 8-12.

---

## Peran Kepala Kampung Dalam Pembangunan Kampung Ngenyan Asa di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

Agus Fransisko Doran\*

*Universitas 17 Agustus Samarinda*

---

### INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:  
Received:  
14 Februari 2020  
Received in revised form:  
5 Maret 2020  
Accepted:  
12 Maret 2020

#### Keyword:

*Head of Village, Village Development*

#### Kata Kunci:

Kepala kampung, Pembangunan kampung

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the role of village head in running the village development and to identify factors inhibiting the village head in carrying out development in Kampung Ngenyan Asa Barong Tongkok District West Kutai. Type of research included qualitative descriptive. The focus of research defined the role of Head of Kampung indicators: governance, village development, develop the economic life of the community, village head inhibiting factor in implementing development in Kampung Ngenyan Asa districts Barong Tongkok West Kutai. While the source of the data taken from informed competent, among which: Kampung Secretary, Staff/Employee Ngenyan Asa Kampung Office whose duties related to the research problem under investigation and the public. While data collection techniques by observation, interviews, and documentation. Analysis of the data used is an interactive model developed. The results showed that the administration of the village and community development is done in the village hall. Realization of democracy in village administration official elements of village government. The village headman to supervise the implementation of the rules and regulations of the village chief. Government administration office is rarely open and difficult village chief in my hometown for meet if you want to take care of the home secretary of the village. Village Development is a deliberate change of the Head and the people in the village, in the form of facilities and infrastructure that can improve people's welfare as planned by the village head to the public. Economic life of the community in terms of economic and social order is good enough, either from outside or from within the village. Head of the village is a driving force of development in social and economic fields means the existence of village headman function mobilize the community in doing something actions or activities to co-develop the economic life of the people in development.*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam menjalankan pembangunan desa dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Kampung Ngenyan Asa Barong Tongkok Kecamatan Kutai Barat. Jenis penelitian termasuk deskriptif kualitatif. Fokus utama penelitian mendefinisikan peran Kepala Indikator Kampung: tata kelola, pembangunan desa, pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat, faktor penghambat kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Kampung Ngenyan Asa kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Sedangkan sumber data yang diambil dari informed competent, di antaranya: Sekretaris Kampung, Staf/Karyawan Kantor Kampung Asa yang tugasnya terkait masalah penelitian yang sedang diselidiki dan masyarakat. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi pembangunan desa dan masyarakat dilakukan di balai desa. Terwujudnya demokrasi dalam unsur pemerintahan desa pemerintah desa. Kepala desa untuk mengawasi pelaksanaan aturan dan peraturan kepala desa. Kantor administrasi pemerintahan jarang buka dan sulit kepala desa di kampung halaman saya untuk ke temui jika ingin mengurus rumah sekretaris desa. Pembangunan Desa merupakan perubahan yang disengaja dari Kepala desa dan masyarakat di desa, berupa sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai rencana kepala desa kepada masyarakat. Kehidupan ekonomi masyarakat dari segi tanaman ekonomi dan sosial sudah cukup baik, baik dari luar maupun dari dalam desa. Kepala desa merupakan motor penggerak pembangunan di bidang sosial dan ekonomi berarti adanya fungsi kepala desa menggerakkan masyarakat dalam melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan untuk bersama-sama mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat dalam pembangunan

---

\* Corresponding author: agusfrand@gmail.com

## Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah telah mencanangkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok tanah air melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan yaitu lima tahun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah desa menyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Administrasi pemerintah daerah dan daerah desanya yang di bantu masyarakat memegang peranan yang penting karena keterlibatan pemerintah yang besar pada proses pembangunan dalam sistem administrasi. Untuk itu agar tujuan pembangunan benar-benar dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya Kepala Desa yang dilihat dari sudut pandang masyarakat, yang menghormati Kepala Desa dapat merealisasikan tujuan-tujuan nasional sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah, dengan titik berat pembangunan perlu diarahkan pada masyarakat pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan.

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh tanah air.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Dan Kedudukan Keuangan Petinggi Dan Keuangan Perangkat Kampung Pasal 1 ayat 7 menyatakan kampung adalah sebutan desa dalam bahasa yang umum dipergunakan penduduk di lingkungan pemerintah kutai barat. Jadi masyarakat yang ada di kutai barat tidak mengenal desa tetapi kampung.

Peran Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan di wilayahnya cukup berat, karena tugas dan fungsi pembangunan tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga pembangunan non fisik. Dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya, kepala kampung bertindak sebagai perencana, pelaksana dan pengawas pembangunan di daerahnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, ditemukan adanya beberapa permasalahan peran Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan baik itu pembangunan fisik dan non fisik. Diantaranya adalah dalam bidang pembangunansarana umum seperti tidak adanya sarana air bersih yang belum memadai, dan tidak adanya kegiatan Karang Masalah-masalah yang diatas tidak harus diselesaikan hanya dengan mengandalkan Kepala Kampung melainkan masalah tersebut merupakan tanggung jawab bersama dimana antara kepala kampung dan masyarakatnya harus ada kerjasama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tetapi disini diharapkan Kepala Kampung menjadi

penggerak ditengah-tengah masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan menuju kearah lebih baik bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah mengenai usaha pemerintah kampung dalam melaksanakan pembangunan kampung dan untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan pembangunan kampung selama ini, maka perumusan masalah dalam penelitan ini adalah:

1. Bagaimana peran kepala kampung dalam pembangunan di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Kepala Kampung dalam melaksanakan pembangunan di Kampung Ngenyan Asa kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat?

## Pembahasan

Peran menurut Rivai (2003:148) dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.pemimpin didalam suatu organisasi mempunyai peran setiap pekerjaan membawa harapan dimana menanggung peran prilaku.Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan prilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Peran didefinisikan secara istilah merujuk pada perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu status tertentu sehingga secara analogi maka peran pemerintah kampung adalah perilaku yang diharapkan dapat dilakukan oleh Kepala kampung dan perangkatnya dalam menjalankan roda pemerintahan kampung.

Menurut Kartono (2010:9) pimpinan formal adalah orang yang oleh organisasi/lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengakatan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam stuktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, utuk mencapai sasaran organisasi. Menurut kartono (2010:10) pemimpin informal ialah, orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pimpinan, namun karena iamemiliki sejumlah kualitas unggul.ia mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis prilaku suatu kelompok atau masyarakat.

Dapat di tarik kesimpulan pemimpin informal ialah, orangyang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin, namun karenamemiliki sejumlah kualitas unggul, maka mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.

Menurut pendapat Suriningrat (2001:64) Kepala Kampung adalah "penguasa tunggal didalam pemerintahan desa,bersama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyenggara urusan rumah tangga desa, disamping itu ia menyenggara urusan-urusan pemerintah". Jadi kepala kampung sebagai kepala pemerintah bertanggung jawab atas atas terselenggaranyanya pembangunan dana tersebut kepala desalah yang memegang peran,yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih langsung masyarakat desa.

Peran Kepala Kampung dalam pembangunan adalah cara yang dilakukan kepala Kampung bagaimana mempengaruhi perilaku individu baik pegawai dan masyarakat untuk bekerjasama dalam pembangunan di kampungnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan Kampung, membina kehidupan masyarakat dan mengembangkan kehidupan perekonomian masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan di lakukan di balai kampung. Perwujudan demokrasi dalam pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah kampung. Kepala kampung melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung dan peraturan kepala kampung. Penyelenggaraan pemerintahan kantor kampung jarang buka kalau mau urus ke rumah sekretaris kampung mana lagi kepala kampung susah di jumpai.

Pembangunan Kampung merupakan perubahan yang disengaja dari Kepala dan masyarakat di kampung, dalam bentuk pembangunan infrastuktur dan Sumber Daya Manusia tetapi dimasa jabatan kepala kampung tidak adanya pembangunan baru Kepala Kampung Hanya meneruskan pembangunan Dari Kepala Kampung sebelum beliau itu pun tidak maksimal. Pembangunan kampung juga memerlukan keterlibatan atau partisipasi masyarakat tersebut dalam proses penentuan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemerintah.

Kehidupan perekonomian masyarakat dari segi perekonomian dan ketertiban masyarakat cukup baik dan tidak maksimal. Kepala Kampung merupakan penggerak pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. artinya keberadaan Kepala kampung belum berfungsi menggerakkan masyarakat dalam melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan untuk turut mengembangkan kehidupan perekonomian masyarakat dalam pembangunan.

## Penutup

Faktor Penghambat kepala kampung untuk pembangunan kampung:

1. Faktor internalnya seperti belum adanya potensi PAK dan PERDES tentang PAK belum ada, untuk pemasukan bagi kampung agar mudah dalam pembangunan jadi tidak hanya mengandalkan dari batu kampung dan alokasi dana kampung (ADK) dan itu saja masih kurang.
2. Faktor eksternal seperti Faktor eksternalnya adalah Anggaran Dana Kampung yang masih kecil, dan lambatnya respon dari camat mengenai pembangunan yang kurang dikampung Ngenyan Asa di karenakan tidak berperan aktifnya kepala kampung.

Oleh karena itu bagi Kepala kampung agar lebih disiplin dalam kerja lebih memprioritaskan pemerintahan kampung dan masyarakat untuk kemajuan kampung ngenyan Asa dan bersama pegawai agar lebih memperhatikan pembanguan yang kurang agar dapat diusulkan ke PEMKAB atau musyawarah rencana pembangunan.

Perekonomian masyarakat agar lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih banyak terbantu. Seharusnya kampung tidak mengharapkan dana kampung tapi membuat proposal atau membuat potensi kampung baik itu pertanian dan kerajinan untuk menambah dana kampung.

## Daftar Pustaka

Kartono, Kartini. 2010. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  
Rivai veithzal, 2003. "*Kepemimpinan Dan perilaku Organisasi*" PT Grafindo persada. Jakarta.  
Suriningrat, Bayu. 2001 "*Pemerintahan Dan Administrasi*" PT. Djaya. Bandung.

### Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1976 *tentang Pemerintah Desa*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 *tentang Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 *tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*.

Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2006 *tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi, Tata Kerja Dan Kedudukan Keuangan Petinggi Dan Keuangan Perangkat Kampung*.